

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

PKL merupakan suatu kegiatan yang digunakan oleh mahasiswa untuk memperoleh pengalaman bekerja secara langsung melalui praktik kerja di industri atau instansi yang relevan dengan bidang studi. Kegiatan PKL dapat membantu mahasiswa dalam memahami hubungan antara teori dan praktik. Melalui PKL, mahasiswa dapat mengaplikasikan secara langsung teori atau wawasan yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti keterampilan komunikasi, berpikir analitis, dan pemecahan masalah. PKL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami dinamika yang ada dalam dunia kerja serta membangun relasi yang berguna dalam mengembangkan karir.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memberikan dukungan terhadap program PKL dengan meluncurkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa aktif untuk melakukan kegiatan PKL selama satu semester yang dapat dikonversi menjadi mata kuliah sebanyak 20 SKS. Dengan demikian, mahasiswa dapat memanfaatkan program MBKM ini untuk melaksanakan PKL sekaligus mendapatkan SKS melalui sistem konversi mata kuliah. Program ini juga bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar lebih mandiri, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang dinamis serta semakin kompetitif.

Pemerintah Kabupaten Kediri adalah salah satu mitra PKL yang telah membangun kerjasama (MOU) dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sejak tahun 2023. Diperkuat dengan penandatanganan kerjasama (MOA) antara Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kediri dengan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri merupakan lembaga

pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Kediri. Tugas utama dari lembaga ini antara lain bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik, pengembangan teknologi informasi, persandian dan keamanan informasi, dan pengelolaan data statistik.

Di era saat ini, data telah menjadi aset yang sangat bernilai bagi pemerintah, khususnya di Kabupaten Kediri. Data menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang efektif. Namun, pemerintah Kabupaten Kediri menghadapi berbagai tantangan terkait kualitas data, seperti masalah validitas, kredibilitas, konsistensi, dan aksesibilitas yang terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Kediri telah mengambil langkah nyata dengan mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui program Satu Data, Open Data, dan Command Centre/Pesona. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan lebih valid, kredibel, akurat, up-to-date, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan di Kabupaten Kediri.

Kebijakan Satu Data Indonesia ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, yang menetapkan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan data secara terbuka untuk mendukung pembangunan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan secara terintegrasi. Kebijakan ini diterjemahkan lebih lanjut melalui peraturan daerah yang mendukung implementasi Satu Data di tingkat kabupaten. Kabupaten Kediri berupaya mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Sebagai wali data, Kabupaten Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika aktif mengintegrasikan semua data data dari seluruh perangkat daerah, desa, dan kecamatan untuk menyajikan suatu data yang efektif bagi perencanaan, pengambilan keputusan sekaligus evaluasi kebijakan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan aplikasi

Pesona Kediri, aplikasi ini digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan data yang ada dari data tingkat desa dan kabupaten. Dengan prinsip data secara transparansi dan interoperabilitas, inisiatif ini juga mendukung koneksi dengan Command Center Kabupaten Kediri dan mengintegrasikan banyak tugas secara mudah untuk menciptakan ekosistem data.

Sebagai mahasiswa PKL di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, penulis memperoleh kesempatan berharga untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di daerah ini. Sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan tersebut, penulis terlibat langsung dalam proyek Satu Data, Open Data, dan Command Center/Dhahanapura. Penulis mengambil peran penting dalam berbagai tugas, seperti menginput data secara akurat dan melakukan verifikasi untuk memastikan keandalan informasi yang ada. Selain itu, penulis juga berkontribusi dalam memvisualisasikan data yang telah terintegrasi untuk memudahkan pemahaman, serta dalam penyusunan Metadata yang informatif, agar data yang disajikan dapat menjadi sumber informasi yang valid dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Melalui peran tersebut, penulis berharap dapat membantu meningkatkan kualitas data dan mendukung perbaikan dalam manajemen informasi di Kabupaten Kediri.

Dalam laporan ini, akan dibahas berbagai tugas dan aspek penting yang telah dijalankan selama masa PKL di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Penulis akan menguraikan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan, tantangan yang dihadapi, manfaat yang diperoleh, serta proses implementasi proyek Satu Data, Open Data, dan Command Center/Pesona di Kabupaten Kediri. Selain itu, dalam laporan ini akan dibahas mengenai peranan penulis dalam mendukung integrasi data lintas sektor, koordinasi dengan perangkat daerah, dan upaya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait pentingnya tata kelola data.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam proyek penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan integrasi data ke Satu Data Indonesia (SDI) di Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kediri sebagai walidata?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia?

## **1.3 Tujuan Pelaksanaan PKL**

Tujuan dari pelaksanaan PKL di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri antara lain:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Mempelajari proses verifikasi dan pengolahan data untuk memastikan akurasi dan kredibilitas informasi dalam kebijakan SDI.
2. Menerapkan wawasan dan keterampilan sains data yang telah dipelajari selama perkuliahan.
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis, baik dalam *hard skill* maupun *soft skill*, secara langsung di dunia industri.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Berperan dan melakukan tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan proyek proyek Satu Data Indonesia (SDI).
2. Mampu mengimplementasikan proyek tersebut dengan mengoperasikan website atau situs yang digunakan

## **1.4 Manfaat**

Manfaat dari pelaksanaan PKL di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri antara lain:

#### **1.4.1 Bagi Penulis**

Bagi penulis, PKL ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data, terutama terkait dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Penulis memperoleh pengalaman langsung dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data, yang berfokus pada pengintegrasian data yang valid dan kredibel. Selain itu, penulis juga mengembangkan kemampuan dalam menyusun metadata dan memvisualisasikan data untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan. Pengalaman ini berguna dalam membangun dasar pengetahuan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi di bidang manajemen data pemerintahan dan analisis data.

#### **1.4.2 Bagi Instansi**

Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, pelaksanaan PKL ini memberikan kontribusi langsung dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui proyek Satu Data, Open Data, dan Command Center /Dhahanapura. Kehadiran penulis membantu dalam proses pengumpulan dan verifikasi data yang akurat, serta pemetaan metadata yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penulis juga turut serta dalam mengintegrasikan data antar instansi yang memungkinkan adanya transparansi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi seluruh pihak terkait. Dengan dukungan ini, instansi di Kabupaten Kediri dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data.

#### **1.4.3 Bagi Universitas**

Bagi universitas, pelaksanaan PKL ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi, khususnya terkait dengan kebijakan Satu Data Indonesia(SDI). Proyek ini bisa menjadi studi kasus yang menarik dalam mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen data, sistem informasi, dan kebijakan publik, serta dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mahasiswa

di berbagai program studi. Selain itu, melalui keterlibatan universitas dalam proyek ini, reputasi lembaga pendidikan dapat meningkat sebagai institusi yang aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengembangkan solusi berbasis data untuk permasalahan nyata. PKL ini juga membuka peluang untuk memperluas jaringan kerjasama antara universitas dan instansi pemerintah di bidang teknologi informasi dan analisis data.